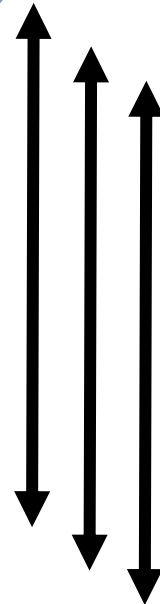


LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



KECAMATAN
KURAU



**KANTOR KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 Desa Padang Luas Kode Pos 70853

KEPUTUSAN CAMAT KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 02 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024
DI LINGKUP KANTOR KECAMATAN KURAU

CAMAT KURAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Kurau tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kurau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 pada lingkup Kantor Kecamatan Kurau.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 dilingkup Kantor Kecamatan Kurau.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kurau

Pada Tanggal : 31 Januari 2025



Plt. Camat Kurau

MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M. AP

Pembina / IVa

NIP. 19870308 200602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KURAU
NOMOR : 04a Tahun 2025
TANGGAL : 31 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
KANTOR KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7.	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Anggota

Plt. Camat Kurau,

MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M. AP

Pembina / IVa

NIP. 19870308 200602 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk penjelasan tentang hubungan realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah di analisis, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan antara realisasi kinerja hingga tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2024 (tahun akhir RPD 2024-2026).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kurau, Januari 2025

Pt. Camat Kurau



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M. AP
Pembina / IVa
NIP. 19870308 200602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) pada Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kecamatan Kurau merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki 11 Desa dengan beragam kehidupan ekonomi masyarakatnya, dengan visinya "**Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik**" Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja birokrasi berkualitas.
3. Meningkatnya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah.
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.
6. Meningkatnya penerapan sistem merit

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kurau, Januari 2025

Plt. Camat Kurau



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M. AP
Pembina / IVa
NIP. 19870308 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	22
1. Sasaran RPJMD	22
2. Eselon III	22
3. Eselon IV	35
B. Akuntabilitas Keuangan	62
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	62
2. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 Menurut Sasaran dan Program	62
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Strategi Peningkatan Kinerja	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati, hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Perubahan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama TA 2024 sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis Tahun 2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Kantor Kecamatan Kurau berusaha untuk mengedepankan isu strategis dan mencoba mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024. Rencana Strategis dimaksud dijabarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengacu pada indikator sasaran strategi yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024. Maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5) ;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119);
10. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Kantor Kecamatan Kurau Tahun Anggaran 2024

C. Struktur Organisasi

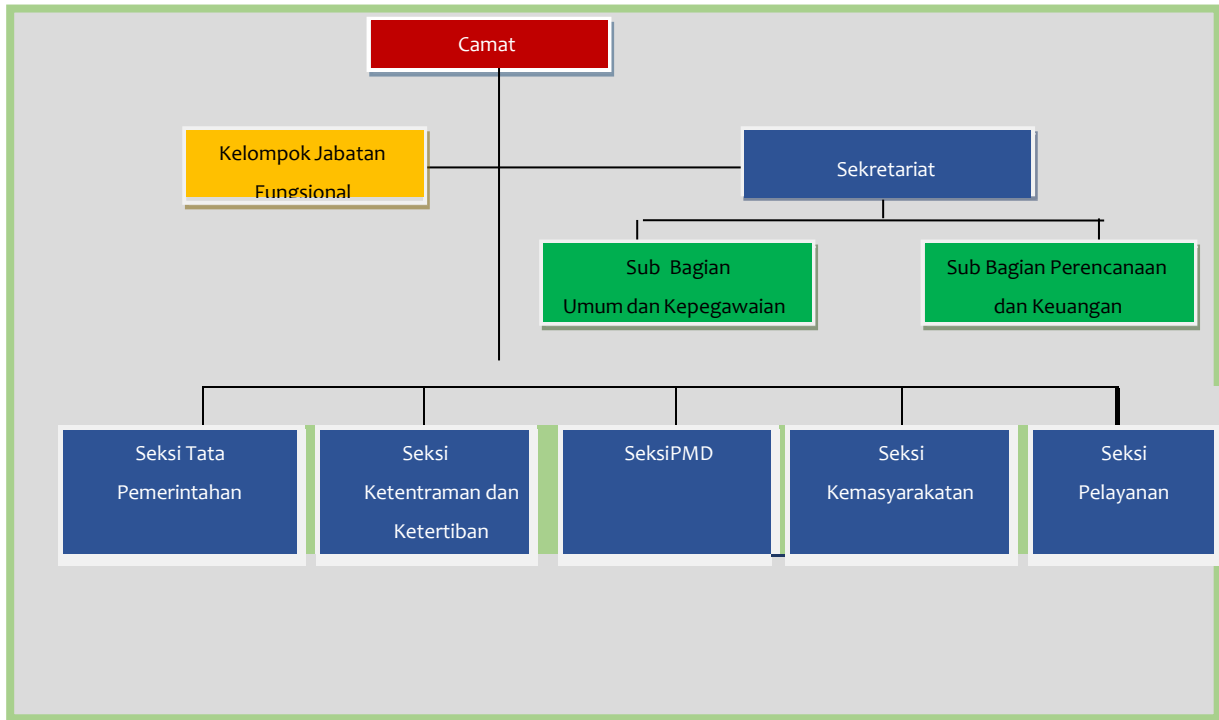
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Kurau mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kurau



1. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kantor Kecamatan Kurau merupakan kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah adalah :

1. Camat

Memimpin kecamatan dalam pelaksanaan tugas merumuskan program, mengatur dan memberi petunjuk, mendistribusi tugas, mengarahkan, merumuskan konsep, menyelia, mengevaluasi, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan sekretariat, seksi tata

pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan, seksi kemasyarakatan dan seksi pelayanan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa

/ kelurahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan dan melaksanakan tugas

– tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan, menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaantugas.

9. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Isu Strategis

Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah

sesuai Visi Misi Kabupaten Tanah laut maka Kecamatan Kurau dapat menentukan Isu-isu Strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Kecamatan Kurau sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut yang menyelenggarakan pelayanan Publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar pelayanan yang secara Normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara Kuantitas, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemanfaatan Peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah ,dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat ,maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan Pemerintah, non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakatnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Tanah laut.
4. Optimalisasi Partisipasi dari kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu pada partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan Peningkatan Infrastruktur Wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam sistematika penyusunan laporan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

SISTEMATIKA PENYUSUNAN	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	
C. Struktur Organisasi	
D. Isu Strategis SKPD	
E. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
1. Sasaran RPJMD	
2. Eselon III (Camat)	
3. Eselon III (Sekretaris Camat)	
4. Eselon IV (Kasi dan Kasubbag)	

B Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia,

pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasi menjadi tujuan dengan sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*)

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut
RPD Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Berkualitas
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan yang Berorientasi Kesetaraan Gender
		4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
		5	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
		6	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan
		2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri Olahan
		3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
		4	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		5	Menurunnya Pengangguran
		6	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
		7	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
		8	Meningkatnya Nilai Investasi
		9	Meningkatnya Kemandirian Pangan
		10	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas
		11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		12	Menurunnya Resiko Bencana

3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Birokrasi Berkualitas
		3	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		4	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah
		5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah
		6	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 karena tidak tersedianya visi misi Kepala Daerah. Konsep RPD diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Meningkatkan Penerapan Sistem Merit, maka ditetapkan tujuan Renstra Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah	IKM	Indeks pelayanan publik	4,53/A	4,53/A	4,54	4,55/A	4,57/A
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Kurau	87	90	90,3	90,5	90,7
			Nilai SAKIP kabupaten	B	69,00(B)	70,01(BB)	75(B)	80,01(A)
		Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan Kurau yang akuntabel	Nilai Sakip kecamatan Kurau		80,01	82	83	83

Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya Kecamatan Kurau yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Kurau.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang (Camat Kurau) untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha

dan kegiatan Kantor Kecamatan Kurau ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan. Berikut dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kurau dalam lima tahun mendatang yaitu, 2024-2026 yaitu sebagai

berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap sapip SKPD
2. Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran
3. Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat
4. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa
5. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah	Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
			Melaksanakan Penyediaan Layanan Administrasi Umum

		Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanaan Pemeliharaan Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan Kurau yang akuntabel	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Melaksanakan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Peangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Peningkatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
			Peningkatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
		Optimalisasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa
			Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa
			Pelaksanaan pembinaan dalam rangka Evaluasi Desa
		Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Penguatan penyelenggaraan Lembaga Kemasyaratan
		Optimalisasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama

			dan Tokoh Masyarakat
		Optimalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja:

- Wujud nyata komitmen, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur
- Dasar Penilaian, Penghargaan dan sanksi
- Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
- Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta formulir Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri yang mengacu pada Renstra, IKU, dan

anggaran yang mana Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu Instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja (PK) terdapat dalam lampiran dan secara ringkas diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel II.6
Target Indikator Kinerja Camat
Kantor Kecamatan Kurau
Kabupaten Tanah Laut

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintaghan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan	0,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,3

Tabel II.7
Target Indikator Kinerja Eselon III (Sekretaris Camat)
Kantor Kecamatan Kurau
Kabupaten Tanah Laut

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	21
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Kecamatan Kurau	Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	80

Tabel II.8
Target Indikator Kinerja Eselon IV
Kantor Kecamatan Kurau
Kabupaten Tanah Laut

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlag Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
1.	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Paket	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	
4.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	
5.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	
6.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	
8.	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	

9.	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	
10.	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	
15.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	31 Unit	
1.	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kasi Pelayanan
1.	Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	

3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	
4.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	
1.	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	
1.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	19 Orang	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	100 Persen	Kepala Seksi Kemasyarakatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1. Eselon IIIa (Camat)

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kurau adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Kurau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Kurau Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja ini akan berisikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini terhadap target dan realisasi kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026 dengan Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.1
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0.45	0.27	60%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.3	88.22	97.69%

1. Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 (satu) : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Rasio Desa Mandiri adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih besar

dari 0,8155. Indeks Desa Membangun adalah alat yang digunakan untuk mengukur status perkembangan desa di Indonesia melalui klasifikasi dari tiga komponen utama yaitu : Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

Pada sasaran strategis 1 (satu) untuk indikator Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan dengan target **0,45** terealisasi **0,27** dengan capaian realisasi terhadap target **60%**. Data realiasi ini berdasarkan Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tentang Perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut. **Rasio 0,27** tersebut di dapat dari 3 (tiga) Desa Mandiri di bagi 11 (sebelas) Desa yang terdapat di Kecamatan Kurau sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} = \text{Rasio Desa Mandiri}$$

$$\frac{38}{11} = 0,27$$

3 (tiga) Desa Mandiri di Kecamatan Kurau adalah :

1. Desa Padang Luas
2. Desa Kurau
3. Desa Bawah Layung

Data Perkembangan Indeks Desa Membangun pada Kecamatan Kurau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Perkembangan Indek Desa Membangun
Kecamatan Kurau Tahun 2024

NO	NAMA DESA	STATUS IDM 2024
1	Desa Padang Luas	Desa Mandiri
2	Desa Kurau	Desa Mandiri
3	Desa Bawah Layung	Desa Mandiri
4	Desa Handil Negara	Desa Maju
5	Desa Sarikandi	Desa Maju
6	Desa Tambak Sarinah	Desa Maju
7	Desa Tambak Karya	Desa Maju
8	Desa Maluka Baulin	Desa Maju
9	Desa Raden	Desa Maju
10	Desa Sungai Bakau	Desa Maju
11	Desa Kali Besar	Desa Berkembang

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan antara lain :

1. Keterbatasan akses modal
2. Kesenjangan teknologi
3. Birokrasi yang rumit
4. Kurangnya keterampilan masyarakat
5. Kondisi jalan yang rusak
6. rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia
7. Etos kerja rendah
8. Bencana alam
9. Minimnya lapangan pekerjaan
10. Potensi ekonomi lokal tidak berkembang

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Penguatan infrastruktur dasar
2. Pemberdayaan ekonomi desa
3. Penguatan sumber daya manusia
4. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi desa
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa

2. Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 (dua) : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah

Pada sasaran strategis 2 (dua) untuk indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah dengan target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) **86** terealisasi **87,89** dengan capaian realisasi terhadap target **102%**.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) responden, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi / Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.3
Nilai Rata - Rata (NRR) dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kurau Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR	IKM
1	Persyaratan	3,433	88,22
2	Prosedur Pelayanan	3,380	88,22
3	Kecapatan Waktu Pelayanan	3,400	88,22
4	Kewajaran Biaya/Tarif	4,000	88,22
5	Kesesuaian Produk dan Standar Pelayanan	3,460	88,22
6	Kemampuan / Kompetensi Petugas	3,433	88,22
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,493	88,22
8	Perilaku Petugas Pelayanan	3,407	88,22
9	Penanganan Pengaduan	3,387	88,22
IKM Unit Pelayanan		31,393	88,22

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Sarana dan Prasarana Pelayanan (3,865), sedangkan unsur Nilai Rata-Rata (NRR) yang terendah adalah unsur Biaya/Tarif (2,000).

Sedangkan untuk unsur pelayanan yang lainnya Nilai Rata-Rata adalah Kompetensi Pelaksana Pelayanan (3,825), unsur Prosedur Pelayanan (3,780), unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan (3,720), unsur Persyaratan Pelayanan (3,700), unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan (3,665), unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,660), dan unsur Waktu Pelayanan (3.590).

Angka ini menunjukkan bahwa penilaian kepuasan masyarakat pada pelayanan Kecamatan Kurau pada umumnya sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata rendah perlu dilakukan perbaikan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur biaya/tarif dan unsur Kecepatan Penyelesaian. Unsur

Biaya/Tarif memiliki nilai rendah karena responden pada Triwulan I dan Triwulan II tidak memberikan penilaian pada unsur Biaya/Tarif sehingga data yang dimasukkan hanya data yang ada pada Triwulan III dan Triwulan IV namun pembagiannya tetap sebanyak 4 (empat) kali Triwulan sehingga nilai NRR menjadi rendah. Unsur terendah selanjutnya adalah unsur waktu pelayanan, berdasarkan analisa hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa Surat yang penandatangannya harus dilakukan oleh Camat atau Sekretaris Camat dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini terjadi karena pada saat diperlukan penandatanganan, posisi Camat atau Sekretaris Camat sedang tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, sedangkan surat tersebut tidak dapat di wakilkkan oleh pejabat yang lain, dan terpaksa harus menunggu karena hal tersebut maka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian surat juga menjadi lebih lama. Adapun surat tersebut meliputi :

1. Surat Keterangan Ahli Waris
2. Surat Rekomendasi
3. Surat Keterangan Usaha
4. Surat Pengurusan Pemekaran Wilayah

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dan capaian sasaran strategis 2 (dua) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah didukung dengan 4 (empat) program, 4 (empat) Kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1). Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Sub Kegiatan Sinertgitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
 - c. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

2. Eselon IIIb (Sekretaris Camat)

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretaris Camat dapat dilihat pada tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024 berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	22,20	92,5
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	21,00	87,5
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	13	7,05	54,23
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	21	14,75	70,24
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Kecamatan Kurau	Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	80	80	100

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris Camat Kecamatan Kurau Tahun 2024 pada sasaran strategis 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator Nilai Komponen Perencanaan dan pada sasaran strategis 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pengukuran dengan indikator Nilai Komponen Pengukuran serta pada sasaran strategis 3 (tiga) Meningkatnya Kualitas Pelaporan dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan tidak terpenuhi target **100%**. Pada sasaran strategis 4 (empat) Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal dengan indikator Nilai Komponen Evaluasi Internal masih berada di bawah target dikarenakan Kecamatan Kurau belum menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut evaluasi SAKIP Tahun 2023. Pada sasaran strategis 5 (lima) Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Kecamatan Kurau dengan indikator Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan telah memenuhi target **100%**.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 1 (satu) untuk indikator Nilai Komponen Perencanaan dengan target 24.00 terealisasi 22.20 dengan capaian realisasi telah memenuhi target 92,5%. Kualitas Perencanaan ini

didasarkan dengan kurang tersusunnya dokumen – dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja dan Perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Nilai Komponen Perencanaan antara lain :

- a. Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai
- b. Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan fisik
- c. Pembatasan pemerintah
- d. Ketidaktepatan dalam perencanaan

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan canggih
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait
- c. Mendapatkan komitmen dari seluruh pihak terkait
- d. Melakukan review penginputan rencana kerja dan anggaran (RKA)

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 2 (dua) untuk indikator Nilai Komponen Pengukuran dengan target 24.00 terealisasi 21.00 dengan capaian realisasi telah memenuhi target 87,5%. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Nilai Komponen Perencanaan antara lain :

1. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran
2. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)
2. Sebaiknya pada setiap notulen rapat pengukuran kinerja agar dilengkapi dengan tanda tangan pimpinan (mengetahui)
3. Dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja agar lebih diperhatikan dan dipastikan apakah komponen yang diukur telah tepat menggambarkan capaian kinerja atau tidak.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya Kualitas Pelaporan

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 3 (tiga) untuk indikator Nilai Komponen Pelaporan dengan target **12.00** terealisasi **12.00** dengan capaian realisasi telah memenuhi target **100%**. Capaian sasaran strategis 3 (tiga) untuk Nilai Komponen Pelaporan telah mencapai target kinerja.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator nilai komponen pelaporan, yaitu laporan kinerja berkala telah disusun, namun masih terdapat data yang tidak konsisten antara isi bab dengan isi tabel yang ditampilkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dalam penyusunan laporan kinerja agar lebih ditingkatkan lagi ketelitian dan akurasi data yang ditampilkan.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal

Evaluasi Internal kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 4 (empat) untuk indikator Nilai Komponen Evaluasi Internal dengan target **20.00** terealisasi **15.50** dengan capaian realisasi **77,50%**. Capaian sasaran strategis 4 (empat)

untuk Nilai Komponen Evaluasi Internal belum mencapai target kinerja dikarenakan Kecamatan Kurau belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal tahun sebelumnya dikarenakan adanya pergantian pejabat yang menangani sehingga menyebabkan keterbatasan dalam pencarian data dukung kelengkapan yang diminta oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator nilai komponen evaluasi internal, antara lain:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan pada seluruh unit belum maksimal
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal
2. Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 5 (lima) Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Kecamatan Kurau

Layanan Penunjang kinerja sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja yang berkualitas guna mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Kurau. Pada sasaran strategis 5 (lima) untuk indikator Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan dengan target **80** terealisasi **80** dengan capaian realisasi telah memenuhi target **100%**.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan, antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana yang banyak mengalami kerusakan diluar perkiraan, sehingga menghambat kinerja
3. Kemajuan teknologi yang selalu melakukan perubahan sistem kerja

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan pengadaan SDM sesuai kebutuhan
2. Menambah sarana dan prasana sesuai kebutuhan
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM untuk menyesuaikan perubahan

Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Penunjang Kinerja pada Sekretariat

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang diampu oleh Sekretaris Camat Kecamatan Kurau didukung dengan 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, Pagu Anggaran dan Realisasi yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.5
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, ANGGARAN DAN REALISASI
SEKRETARIS CAMAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
KECAMATAN		3.450.554.432,00	2.974.695.067,00	86,21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.450.554.432,00	2.974.695.067,00	86,21
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.246.969,00	2.910.000,00	68,52
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.909.594,00	2.410.000,00	82,83
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	1.337.375,00	500.000,00	37,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.502.423.431,00	2.152.140.714,00	86,00
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.501.941.976,00	2.151.740.714,00	86,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	481.455,00	400.000,00	83,08
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.412.800,00	8.120.000,00	86,27
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	9.412.800,00	8.120.000,00	86,27

LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2024

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.309.942,00	349.074.436,00	87,42
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	572.391,00	529.200,00	92,45
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	111.788.796,00	86.595.900,00	77,46
	Penyediaan peralatan rumah tangga	24.501.105,00	18.600.000,00	75,91
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.541.525,00	3.518.662,00	53,79
	Penyediaan bahan/material	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	238.975.000,00	223.030.674,00	93,33
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.931.125,00	1.800.000,00	93,21
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.232.642,00	193.989.000,00	89,71
	Pengadaan Mebel	16.543.799,00	15.000.000,00	90,67
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	199.688.843,00	178.989.000,00	89,63
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.128.648,00	184.626.759,00	86,63
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.862.160,00	32.087.079,00	55,45
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488,00	152.539.680,00	98,24
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.800.000,00	83.834.158,00	79,24
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000,00	20.604.724,00	68,68
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	63.500.000,00	61.879.434,00	97,45
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.300.000,00	1.350.000,00	10,98
TOTAL		3.450.554.432,00	2.974.695.067,00	86,21

Tabel 3.6

Tabel Efisiensi

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	87,89%	12,11%

Berikut tabel yang menjelaskan Sasaran Strategis Pelayanan yang telah di capai oleh semua Seksi di Kecamatan Kurau berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang di buat sebagai berikut :

1. Kasi Pemerintahan

- a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.14

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Pemerintahan**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19 orang	19 orang	100%	19 orang
Rata - Rata capaian Kinerja					100%	

- b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di pelayanan Publik bidang pemerintahan dari semua target, capaian dan realisasi antara tahun 2023 dan 2024 Jumlah desa yang ada

di Kecamatan Kurau sebanyak 11 desa, untuk jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat pada tahun 2023 dan 2024 ada 11 desa yang melaporkan data kependudukannya dengan tertib dan akurat. Pelaksanaan Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan tahun 2023 dan 2024 jumlah peserta Paskibraka tetap sebanyak 19 orang atau 100% terdiri atas siswa SMK dan SMU.

c. Analisis Kegiatan

Kegiatan Kasi Pemerintahan selama Tahun 2024 yaitu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan sebagai kesatuan politik sosial budaya ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falfasah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Pemerintahan hanya 1 orang

e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Pemerintahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	99.999.589,00	94.949.271,00	94,9
Rata - rata Capaian Kinerja				99.999.589,00	94.949.271,00	94,95







Keterangan : Paskibraka Tahun 2024

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Kendala yang dihadapi untuk pendukung kinerja Kecamatan Kurau adalah dukungan antar pegawai dan koordinasi dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan pemerintah kab/kota dan SKPD terkait. Selain itu, fasilitas diberikan Kecamatan Kurau untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 3.16
Tabel Efisiensi
Bidang Pemerintahan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	94,85%	5,15%

2. Kasi Kemasyarakatan

a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.17
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023
Bidang Kemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100	100	100%	-
Rata - Rata capaian Kinerja					100%	

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang kemasyarakatan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dari Fasilitasi kegiatan di bidang sosial,keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 1 kegiatan telah terealisasi 3 kegiatan yaitu Safari Ramadhan

dan pelaksanaan MTQ atau 100% pada tahun 2023, untuk Tahun 2024 kegiatan Safari Ramadhan, MTQ dan penyaluran dana hibah terlaksana 100%.

c. Analisis Kegiatan

Pemberian Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Kurau dari Rp. 445.320.000,- melalui ajuan proposal dari organisasi masyarakat yang ada di desa, dari ajuan proposal terjaring sebanyak 6 (enam) proposal organisasi kemasyarakatan dan sudah melaksanakan sesuai NPHD dengan serapan Rp. 445. 320.000,- (100%).

Melaksanakan Safari Ramadhan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh SKPD beserta jajarannya di Desa Kurau Kecamatan Kurau bertempat di Tambak Sarinah.

Pelaksanaan MTQN ke XLV Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 di Kecamatan Jorong. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Kintap untuk Kecamatan Kurau mendapat peringkat ke 5 dan Juara 2 Pawai Ta'aruf.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Kemasyarakatan hanya 1 orang ASN.

e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

Tabel 3.18
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Kemasyarakatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	565.228.126,00	561.993.800,00	99,43
Rata - rata Capaian Kinerja				565.228.126,00	561.993.800,00	99,43

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap Program Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat di wilayah Kecamatan juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.19
Tabel Efisiensi
Bidang Kemasyarakatan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	99,43%	0,57%



Keterangan : Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Tahun Anggaran 2024



Keterangan : Kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2024

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.20
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1	100%	-
2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1	100%	
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	22	100%	
4.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2	100%	
Rata - Rata capaian Kinerja					100%	

a. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2023 telah terfasilitasi sebanyak 11 kelompok dan tahun 2024 juga telah terfasilitasi 11 kelompok, terkait pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat pada tahun 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 11 desa dan pada tahun 2024 ada 11 desa dari target 11 desa atau 100% hal ini disebabkan setiap desa belum semua mampu menyusun profil desa

dengan baik dikarenakan sumber daya desa yang masih belum maksimal untuk menyusun profil desa yang baik dan pada tahun 2024 hanya 11 desa, untuk Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2023 telah difasilitasi 11 desa dan tahun 2024 telah difasilitasi 11 desa atau 100%, untuk pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan pada tahun 2023 telah difasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 kali dan pada tahun 2024 juga telah difasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 kali atau 100% di Kecamatan Bumi makmur berdasarkan Dapil yang disertai tahapan pelaksanaan melalui MusrenbangDes.

b. Analisis Kegiatan

Penilaian keberhasilan Camat merupakan upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada evaluasi perkembangan kecamatan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan merupakan Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Pemerintahan hanya 1 orang ASN dan 1 orang PTT.

d. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

Tabel 3.21
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.600.000,00	21.810.000,00	96,50
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.012.688,00	-	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.997.324,00	14.625.000,00	97,52
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.999.598,00	5.972.400,00	54,30
Rata - rata Capaian Kinerja				22.600.000,00	21.810.000,00	96,50

e. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Pelaku usaha skala mikro dan kecil merupakan salah satu penopang perekonomian warga dan juga Kecamatan Kurau, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan fasilitasi agar memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.

Tabel 3.22
Tabel Efisiensi
Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	96,50%	3,50%



Keterangan : Evaluasi RAPBDes

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.23
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	8	100%	-
Rata - Rata capaian Kinerja					100%	

- b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi untuk tahun 2023 terfasilitasi sebanyak 1 kegiatan sedangkan tahun 2024 terfasilitasi sebanyak 1 kegiatan atau 100%, Jumlah sosialisasi penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring pada tahun 2023 adalah 11 kali dan tahun 2024 adalah 11 kali atau 100%.

- c. Analisis Kegiatan

Kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban selama Tahun 2024 melaksanakan sosialisasi narkoba terhadap anak-anak sekolah dan melakukan pemantauan, pengawasan analisis dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah.

- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Ketentraman dan Ketertiban 2 orang ASN.

- e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

Tabel 3.24
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.134.500,00	45.225.000,00	73,98
Rata - rata Capaian Kinerja				61.134.500,00	45.225.000,00	73,98

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kurau diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.

Tabel 3.25
Tabel Efisiensi
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	73,98%	26,02%



Keterangan : Kegiatan Forkopimcam

7. Kasi Pelayanan

- a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.26
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2	100%	-
Rata - Rata capaian Kinerja					100%	

- b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pelayanan pada Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP pada tahun 2023 dan tahun 2024 berjumlah 7 layanan atau 100% dari, Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang terdata ada 1 dokumen tahun 2023 dan pada tahun 2024 ada 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.

- c. Analisis Kegiatan

Analisis kegiatan terhadap kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 86,34% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain

karena :

1. Adanya komitmen bersama.
 2. Dukungan perencanaan bagus.
 3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
 4. Dukungan sarana dan praarana yang memadai.
 5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.
- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Jumlah ASN di bidang Kasi Ketentraman dan Ketertiban hanya 1 orang ASN dan 1 orang PTT.
- e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja
- f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Tabel 3.27
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Pelayanan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.968.098,00	4.063.000,00	81,78
Rata - rata Capaian Kinerja				4.968.098,00	4.063.000,00	81,78

Kecamatan Kurau harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat-surat kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat;

Tabel 3.28
Tabel Efisiensi
Bidang Pelayanan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	81,78%	18,22%



Keterangan : Kegiatan Pelayanan

Sasaran II : Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran kepegawaian, perencanaan dan pelaporan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian dan Perencanaan, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- a) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, dan hal terkait tugas dan fungsi.
- b) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pembayaran TPP berbasis *e-kita* secara online.
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian dandalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan absensi finger print baik absen masuk dan pulang kantor.
- d) Kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu: Revisi terhadap Indikator Sasaran Renstra 2024 - 2026, Renja 2023, RKT, RKA, DPA 2024, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan LAKIP, dan LKPJ tahun 2024.
- e) Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi KUR, RKBU, dll.
- f) Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor meliputi pemeliharaan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sedangkan untuk pemeliharaan peralatan meliputi AC, kursi, printer, dll

Adapun uraian yang berhubungan dengan sasaran strategis II sebagai berikut:

Tabel 3.29
Pencapaian Sasaran Strategis II
Kecamatan Kurau Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Tingkat capaian
				2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	22,20		
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	21,00		
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	13	7,05		
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	21	14,75		
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Kecamatan Kurau	Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	80	80		

Sasaran pada rencana strategis II yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kurau dari 5 (lima) indikator kinerjanya target untuk Nilai Komponen Kecamatan pada tahun 2024 adalah 24, Nilai Komponen Pengukuran Tahun 2024 24, Nilai Komponen Pelaporan Tahun 2024 adalah 13, Nilai Komponen Evaluasi Internal adalah 21 sedangkan untuk Hasil survey pelayanan kesekretariatan tahun 2024 dari target 80.

Tabel 3.30
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	

**LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2024**

2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang	100%	
4	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	

**Tabel 3.31
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Perencanaan dan Keuangan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.909.594,00	2.410.000,00	82,83
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	1.337.375,00	500.000,00	37,39
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.501.941.976,00	2.151.740.714,00	86,00
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	481.455,00	400.000,00	83,08
Rata - rata Capaian Kinerja				2.506.670.400,00	2.155.050.714,00	85,97

**Tabel 3.32
Tabel Efisiensi
Bidang Perencanaan dan Keuangan**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	85,97%	14,03%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 2 di bidang Perencanaan dan Keuangan pada Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2024 ada 9 dokumen yang disusun dan tahun 2024 dari target 9 dokumen telah tersusun 9 dokumen, adapun dokumen yang disusun adalah Renstra 2024 - 2026, Renja 2025, RKT, RKA, DPA 2024, DPA Perubahan 2024, Laporan AKIP 2023 dan LKPJ tahun 2023, kemudian untuk Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dalam tahun 2024 sebanyak 3 laporan dan pada tahun 2024 sebanyak 3 laporan dari target 3 laporan atau 100% yaitu CALK, laporan bulanan dan Laporan triwulanan. Dari semua dokumen yang ada pada bagian perencanaan dan keuangan, nantinya akan direviu untuk penentuan nilai kinerja Kecamatan Kurau sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja secara keseluruhan.

Tabel 3.33
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024
Bidang Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1		
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	11		
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1		
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1		
5.	Tersedianya Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	4 Paket	4		
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12		
7.	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	7		

**LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2024**

8.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit	63		
9.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2		
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12		
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12		
12.	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1		
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11		
14.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	26		
15.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1		

**Tabel 3.34
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Bidang Umum dan Kepegawaian**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	9.412.800,00	8.120.000,00	86,27

**LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2024**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	572.391,00	529.200,00	92,45
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	111.788.796,00	86.595.900,00	77,46
		Penyediaan peralatan rumah tangga	24.501.105,00	18.600.000,00	75,91
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.541.525,00	3.518.662,00	53,79
		Penyediaan bahan/material	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	238.975.000,00	223.030.674,00	93,33
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.931.125,00	1.800.000,00	93,21
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	16.543.799,00	15.000.000,00	90,67
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	199.688.843,00	178.989.000,00	89,63

**LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2024**

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.862.160,00	32.087.079,00	55,45
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488,00	152.539.680,00	98,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000,00	20.604.724,00	68,68
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	63.500.000,00	61.879.434,00	97,45
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.300.000,00	1.350.000,00	10,98
	Rata - rata Capaian Kinerja			261.066.488,00	236.373.838,00

**Tabel 3.35
Tabel Efisiensi
Bidang Umum dan Kepegawaian**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	90,54%	9,46%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 2 di bidang Umum dan Kepegawaian untuk Jumlah ASN yang tahun 2024 berjumlah 17 orang terdiri dari 10 orang PNS, 1 orang PPPK, 6 orang PTT dan semua sudah terlayani dengan baik atau 100%, tahun 2024 mengalami 3 kekosongan jabatan yaitu Camat, Sekretaris Camat dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, untuk jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada tahun 2024 telah dipelihara 100%, adapun di tahun 2024 jenis sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan roda 2 dan 4, untuk jumlah dokumen administrasi kepegawaian baik tahun 2023 maupun 2024 berjumlah 20 dokumen dan telah dilaksanakan sebanyak 20 dokumen juga, pada jumlah fasilitasi diklat dan sertifikat pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada fasilitasi tersebut.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Realisasi keuangan APBD Kecamatan Kurau berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Belanja

Realisasi belanja Kecamatan Kurau pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisaisi Belanja Kecamatan Kurau Tahun 2024

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	BELANJA OPERASI	3.925.522.114,00	3.451.291.538,00	87,92
1	Belanja Pegawai	2.501.941.976,00	2.151.740.714,00	86,00
2	Belanja Barang dan jasa	978.260.138,00	854.230.824,00	87,32
3	Belanja Hibah	445.320.000,00	445.320.000,00	100,00
II	BELANJA MODAL	319.122.241,00	279.192.000,00	87,49
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.433.398,00	100.203.000,00	83,90
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.688.843,00	178.989.000,00	89,63
JUMLAH		4.244.644.355,00	3.730.483.538,00	87,89

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Rincian realisasi Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program untuk Kecamatan Kurau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3. 22
ALOKASI DAN REALISASI KEUANGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.909.594,00	2.410.000,00	82,83
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.337.375,00	500.000,00	37,39
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.501.941.976,00	2.151.740.714,00	86,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	481.455,00	400.000,00	83,08
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.412.800,00	8.120.000,00	86,27
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	572.391,00	529.200,00	92,45
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.788.796,00	86.595.900,00	77,46

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.501.105,00	18.600.000,00	75,91
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.541.525,00	3.518.662,00	53,79
		Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.975.000,00	223.030.674,00	93,33
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.931.125,00	1.800.000,00	93,21
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	16.543.799,00	15.000.000,00	90,67
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.688.843,00	178.989.000,00	89,63
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.862.160,00	32.087.079,00	55,45
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.266.488,00	152.539.680,00	98,24

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	20.604.724,00	68,68
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.500.000,00	61.879.434,00	97,45
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.300.000,00	1.350.000,00	10,98
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.968.098,00	4.063.000,00	81,78

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.600.000,00	21.810.000,00	96,50
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.150.000,00	7.150.000,00	100

V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	99.999.589,00	94.949.271,00	94,9
---	--	---	---	---------------	---------------	------

			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keaman Lokal, Regional dan Nasional	565.228.126,00	561.993.800,00	99,43
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.134.500,00	45.225.000,00	73,98
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.012.688,00	-	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.997.324,00	14.625.000,00	97,52
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.999.598,00	5.972.400,00	54,30

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 ada 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan sedangkan di Tahun 2023 ada 6 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran Tahun 2023 untuk seluruh belanja sebesar Rp. 3.429.575.371,-. Dibandingkan Tahun 2024 jumlah anggaran belanja naik yaitu sebesar Rp. 4.381.661.531,- dari anggaran perubahan. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah program dan kegiatan dan pagu Tahun 2023 – 2024 adalah sebagai berikut :

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Total Anggaran Rp. 4.381.661.531,00			Total Anggaran Rp. 4.244.644.355,00	

Adapun realisasi belanja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.692.112.948,- , dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.730.483.538,-. Sedangkan untuk belanja pegawai pada belanja operasi anggaran Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.151.740.714,- dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.001.660.844,-. Belanja modal meningkat di Tahun 2024 sebesar Rp. 121.778.200,-.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dapat dijadikan masukan penting bagi Kantor Kecamatan Kurau dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan adanya tantangan internal maupun eksternal lainnya. Selain tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan kinerja baik yang telah berhasil dicapai, dapat dipertimbangkan pula perluasan dan penajaman indikator sasaran. Angka target yang ditetapkan dapat pula ditinjau ulang untuk ditingkatkan dalam rangka percepatan perwujudan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024 - 2026 dikategorikan BAIK. Kategori Baik Tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Kurau tahun 2024 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 100%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya *Performance Management System/PMS*) di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki,

Kantor Kecamatan Kurau mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Pada program kegiatan yang belum optimal dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kurau pada tahun 2024 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang. Sedangkan hambatan maupun kendala tersebut dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan oleh semua pihak dilingkup Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan didalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam

dokumen LAKIP;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan dalam pelayanan masyarakat. Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ini menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan harapan masyarakat Kecamatan Kurau pada umumnya.

Kurau, Januari 2025

Plt. Camat Kurau



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M. AP
Pembina / IVa
NIP. 19870308 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

Pelaihari, 19 September 2024
CAMAT KURAU

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

JABATAN : CAMAT (Pejabat Eselon III/a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN KURAU
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik			
	1	Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan	Rasio	0,45
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,3
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja internal Kecamatan Kurau			
	1	Nilai Sakip Kecamatan Kurau	Nilai	82

Keterangan :

- Jumlah Program : 6 Program
- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 28 Sub Kegiatan
- Jumlah Anggaran : Rp. 4.244.644.355

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 3.450.554.432
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 4.246.969
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.909.594
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.337.375
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 2.502.423.431
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.501.941.976
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 481.455
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 9.412.800
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 9.412.800
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 399.309.942
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 572.391
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 111.788.796
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 24.501.105
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6.541.525
		- Penyediaan Bahan Material	Rp. 15.000.000
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 238.975.000
		- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 1.931.125
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 216.232.642
		- Pengadaan Mebel	Rp. 16.543.799
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 199.688.843
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 213.128.648
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 57.862.160
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 155.266.488
	7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 105.800.000
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 30.000.000
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 63.500.000
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 12.300.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp. 4.968.098
	8). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp. 4.968.098
		- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 4.968.098
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp. 22.600.000
	9). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp. 22.600.000

		- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	22.600.000
--	--	---	-----	------------

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.	7.150.000
	10). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.	7.150.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	7.150.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	726.362.215
	11). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp.	726.362.215
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	99.999.589
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.	565.228.126
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.	61.134.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	33.009.610
	12). Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp.	33.009.610
		- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	7.012.688
		- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	14.997.324
		- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp.	10.999.598

Pj. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

CAMAT KURAU

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SAMSUDINOR, SKM, ME

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

Kurau, 19 September 2024

Sekretaris Camat

H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan		
	1) Nilai komponen perencanaan	Nilai	24
	2) Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24
	3) Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12
	4) Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	21
	5) Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	80

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.412.800
	2). Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	572.391
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.788.796
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.501.105
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.541.525
		Penyediaan Bahan Material	15.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.975.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.931.125
	3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pengadaan Mebel	16.543.799
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.688.843
	4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	57.862.160
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.266.488
	5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000
	6). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.909.594
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.337.375
	7). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.501.941.976
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPI	481.455

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

SEKRETARIS CAMAT



H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTABA, S.Pd

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SAMSUDINOR, SKM, ME

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Camat

H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003

Kurau, 19 September 2024
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MUTABA, S.Pd
NIP. 19660903 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1.	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal	Presentase Capaian Pelayanan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang optimal	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4.	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1.	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket
4.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
6.	Tersedianya Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	1 Paket
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan
8.	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen
9.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
10.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
15.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.412.800

2). Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	572.391
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.788.796
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.501.105
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.541.525
Penyediaan Bahan Material	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.975.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.931.125

3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Mebel	16.543.799
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.688.843

4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	57.862.160
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.266.488

5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.500.000
	12.300.000

Kurau, 19 September 2024

SEKRETARIS CAMAT



H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



MUTTABA, S.Pd
NIP. 19660903 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWARI UTAMI DEWI, S. Ak

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SAMSUDINOR, SKM, ME

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Camat

H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003

Kurau, 19 September 2024
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

ISWARI UTAMI DEWI, S. Ak
NIP. 19820301 201001 2 018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang
4	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		
	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.909.594
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.337.375
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.501.941.976
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuang	481.455

Kurau, 19 September 2024

SEKRETARIS CAMAT

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



H. SAMSUDINOR, SKM, ME
NIP. 19740509 199803 1 003

ISWARI UTAMI DEWI, A.Md
NIP. 19820301 201001 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. PATHURRAHMAN

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

Kurau, 19 September 2024

Kasi Pelayanan

Drs. PATHURRAHMAN
NIP. 19680908 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.968.098
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		4.968.098
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.968.098

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos

NIP. 19700202 199303 1 012

KASI PELAYANAN



Drs. PATURRAHMAN

NIP. 19680908 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. BAHRUDDIN

Jabatan : Kasi Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

Kurau, 19 September 2024
Kasi Tata Pemerintahan

Drs. BAHRUDDIN
NIP. 19670708 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis Sesuai Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1.	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1.	Terlaksananya Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	99.999.589

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

KASI PEMERINTAHAN



Drs. BAHRUDDIN
NIP. 19670708 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMANSYAH, S.STP, MM

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kurau, 19 September 2024

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

FIRMANSYAH, S.STP, MM
NIP. 19741105 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis Sesuai Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1.	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.150.000
	1). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7.150.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.150.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		61.134.500
	11). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		61.134.500
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.134.500

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



FIRMANSYAH, S.STP, MM
NIP. 19741105 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SRI RAHMIATI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

Kurau, 19 September 2024
Kepala Seksi Kemasyarakatan

Hj. SRI RAHMIATI, SE
NIP. 19750720 200701 2 017

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis Sesuai Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A	KINERJA KEGIATAN		
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%
B	KINERJA SUB KEGIATAN		
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
----	---------	----------	---------------

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	565.228.126
---	-------------

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

KASI KEMASYARAKATAN



Hj. SRI RAHMIATI, SE
NIP. 19750720 200701 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU

Jalan Swadaya No. 111 RT. 02 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kode Pos 70853

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIZAL RIZA, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULPUADDIN, S.Sos

Jabatan : Camat Kurau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kurau, 19 September 2024
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa

Camat Kurau

ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

FAIZAL RIZA, S.Sos
NIP. 19770417 200604 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN KURAU**

NO	Sasaran Strategis Sesuai Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA KEGIATAN			
1.	Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%
B. KINERJA SUB KEGIATAN			
1.	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22 Dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		22.600.000
	1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		22.600.000
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.600.000
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		51.993.844
	2). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		51.993.844
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.996.922
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.997.324
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.999.598

Kurau, 19 September 2024

CAMAT KURAU



ZULPUADDIN, S.Sos

NIP. 19700202 199303 1 012

KASI PEMBFRDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



FAIZAL RIZA, S.Sos

NIP. 19770417 200604 1 005